

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS I B**



TRIWULAN IV

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
KELAS 1B**

Disahkan di Situbondo
Pada Hari Rabu, 31 Desember 2025

Pengawas Tim Survei,


Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.
NIP. 19860403 200912 1 006

Koordinator Tim Survei,


Abd. Mukti, S.H.
NIP. 19660627 199303 1 005

Penanggung Jawab,


Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.
NIP. 19770327 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, telah disusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Triwulan IV Tahun 2025 ini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB secara elektronik, menggunakan aplikasi SISUPER pada link : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survei maka disusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan harapan hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Triwulan IV Tahun 2025 disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Situbondo, 31 Desember 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	5
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	7
3.1. Profil Responden	7
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	7
3.1.2. Pekerjaan Responden	8
3.1.3. Kelompok Usia	8
3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin.....	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator	11
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan	11
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	11
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh	12
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya	13
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan	14
3.2.6. Indikator Hadiah	14
3.2.7. Indikator Transparansi Biaya	15
3.2.8. Indikator Percaloan	16
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang	17
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia	17
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja	18
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan	19
BAB IV PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Rekomendasi	20

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Hal.
1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	6
2. Nilai Persepsi	6
3. Responden Karakteristik Pendidikan	7
4. Responden Karakteristik Pekerjaan	8
5. Responden Karakteristik Umur	9
6. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Manipulasi Peraturan	11
7. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	11
8. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Menjual Pengaruh	12
9. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transaksi Biaya	13
10. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Biaya Tambahan	14
11. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Hadiah	15
12. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transparansi Biaya	16
13. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Percaloan	16
14. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Perbuatan Curang.....	17
15. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transaksi Rahasia	18
16. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Situbondo	18

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Hal.
1. Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju ZI	5
2. Grafik Responden Karakteristik Pendidikan	7
3. Grafik Responden Karakteristik Pekerjaan	8
4. Grafik Responden Karakteristik Umur	9
5. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Manipulasi Peraturan	10
6. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Penyalahgunaan Jabatan.	10
7. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Menjual Pengaruh	11
8. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transaksi Biaya	12
9. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Biaya Tambahan	13
10. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Hadiah	13
11. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transparansi Biaya	14
12. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Percaloan	15
13. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Perbuatan Curang.....	15
14. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Pengguna Layanan	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB.
- Penyiapan Bahan
Menyiapkan sarana prasarana penunjang pelaksanaan survei secara elektronik, yaitu menyiapkan 1 unit PC, koneksi internet dan browser untuk mengakses Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden adalah 100 orang.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

Lokasi pengumpulan data/survei terpusat pada Ruang Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER), hasil survei kemudian disajikan dalam bentuk laporan.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam 1 tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Situbondo.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi melalui aplikasi Survey Pelayanan Eketronik (siSUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dengan responden sebanyak 100 (seratus) orang.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1.
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

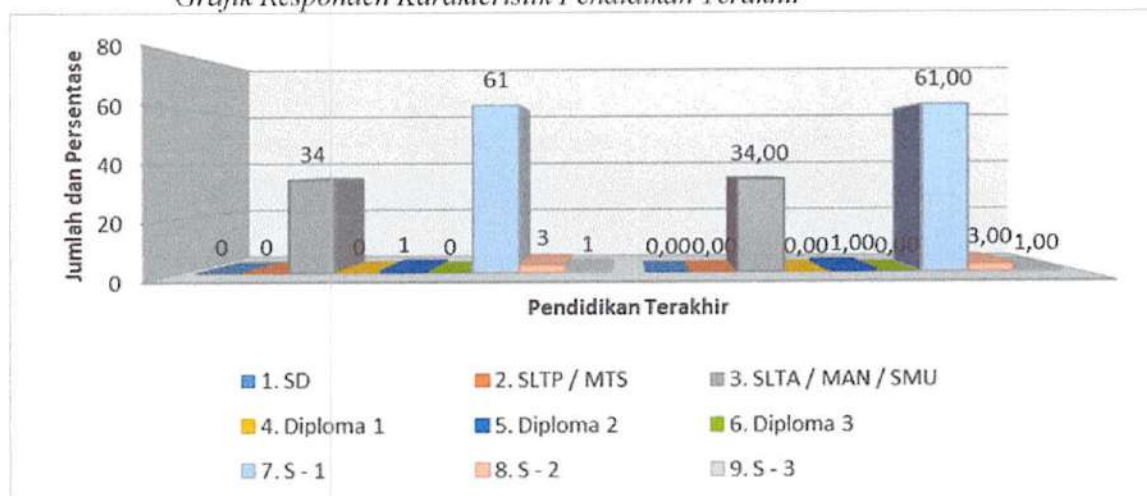
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Situbondo mayoritas memiliki latar pendidikan S-1, yaitu sebanyak 61 orang (61,00%).

Tabel 3.

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1. SD	0	0,00
2. SLTP / MTS	0	0,00
3. SLTA / MAN / SMU	34	34,00
4. Diploma 1	0	0,00
5. Diploma 2	1	1,00
6. Diploma 3	0	0,00
7. S - 1	61	61,00
8. S - 2	3	3,00
9. S - 3	1	1,00
Jumlah Data	100	100

Responden Karakteristik Pendidikan

Gambar 2.
Grafik Responden Karakteristik Pendidikan Terakhir



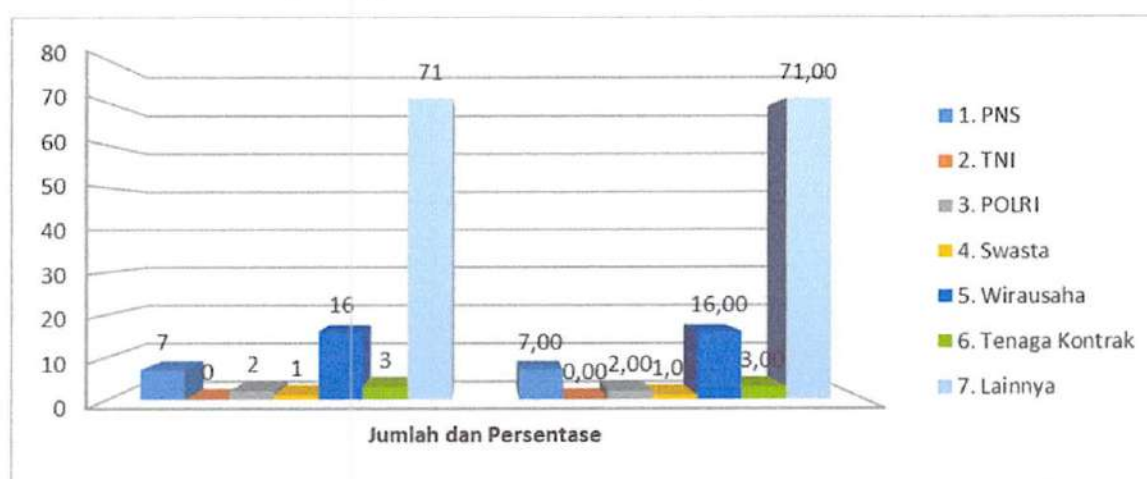
3.1.2. Pekerjaan Responden

Mayoritas Responden berprofesi sebagai **lainnya** yaitu sebanyak **71 orang (71,%)**, diharapkan keseluruhan responden mengerti dan memahami objek yang akan ditanyakan dan memberikan penilaian yang sesubjektif mungkin.

Tabel 4.
Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase (%)
1. PNS	7	7,00
2. TNI	0	0,00
3. POLRI	2	2,00
4. Swasta	1	1,00
5. Wirausaha	16	16,00
6. Tenaga Kontrak	3	3,00
7. Lainnya	71	71,00
Jumlah Data	100	100

Gambar 3.
Grafik Responden Karakteristik Pekerjaan



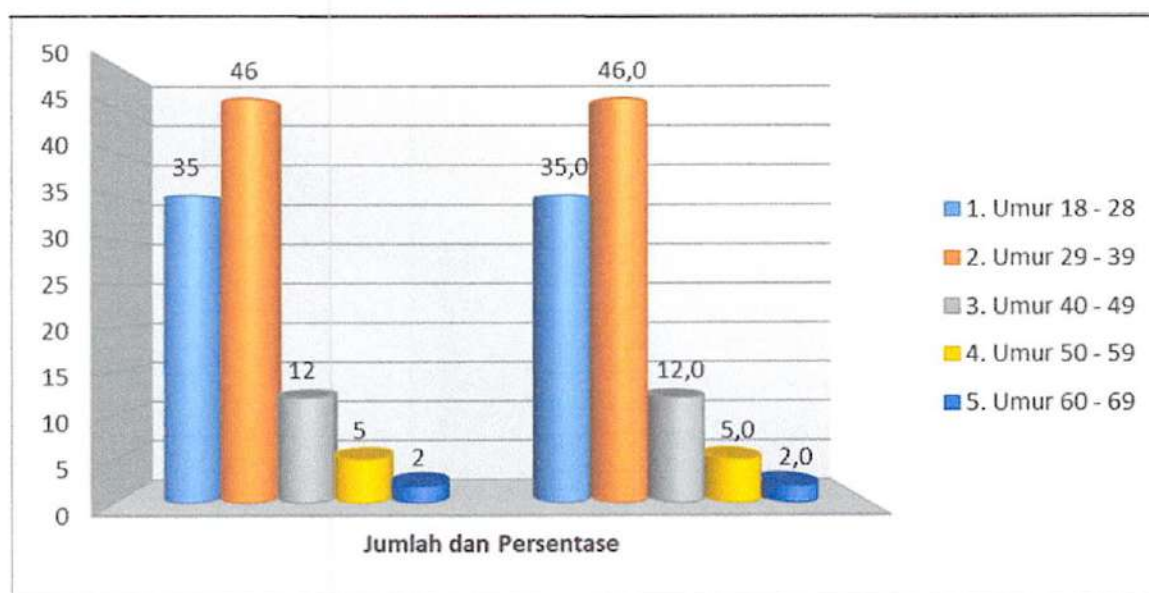
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Dari hasil analisa data yang terkumpul, menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok 29 – 39 tahun yaitu sebanyak 46 orang (46,0 %).

Tabel 5.
Jenis Umur Responden

Umur	Frekuensi	Prosentase (%)
1. Umur 18 - 28	35	35,0
2. Umur 29 - 39	46	46,0
3. Umur 40 - 49	12	12,0
4. Umur 50 - 59	5	5,0
5. Umur 60 - 69	2	2,0
Jumlah Data	100	100

Gambar 4.
Grafik Responden Karakteristik Umur



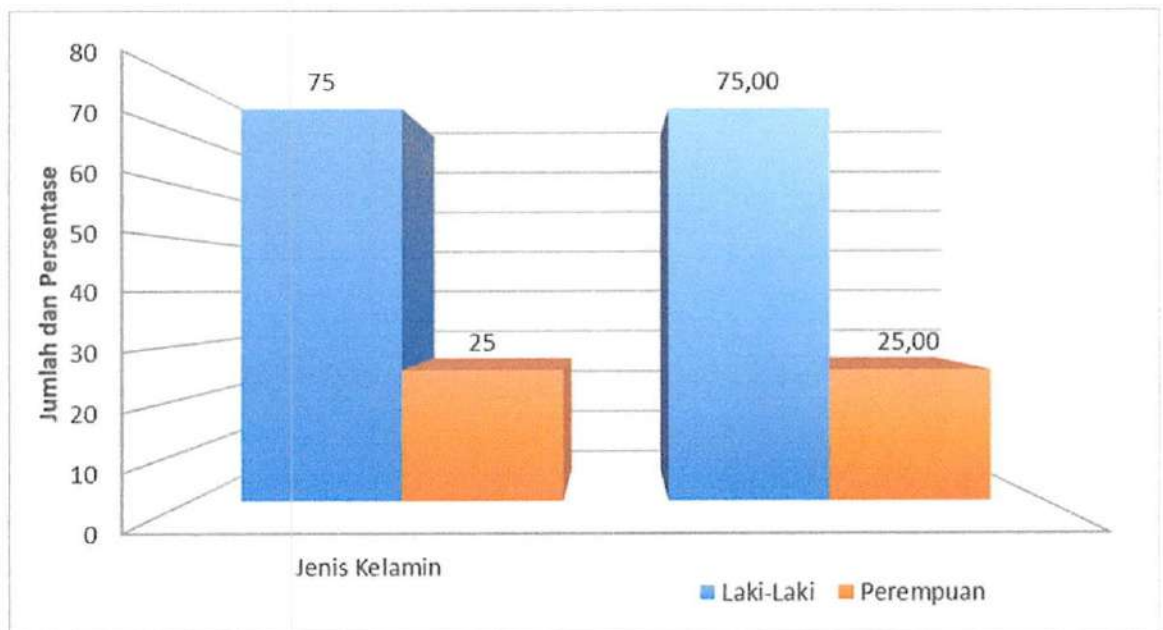
3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin

Dari hasil analisa data yang terkumpul, menunjukkan bahwa mayoritas responden berada adalah laki – laki yaitu sebanyak sebanyak **75 orang** (75, %).

Tabel 6.
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Laki-Laki	75	75,00
Perempuan	25	25,00
Jumlah Data	100	100

Gambar 5.
Grafik Responden Karakteristik Jenis Kelamin



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan nilai rata-rata 3,940 dengan nilai konversi sebesar 98,5 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan tanpa adanya manipulasi peraturan dengan maksud tertentu.

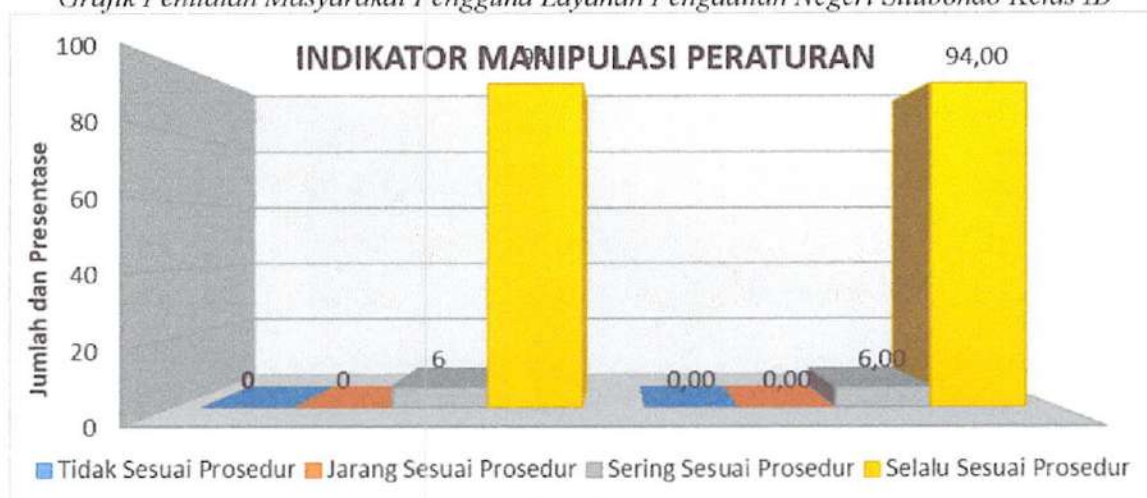
Tabel 7.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB pada Indikator Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0,00
Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0,00
Sering Sesuai Prosedur	3	6	6,00
Selalu Sesuai Prosedur	4	94	94,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 6.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan nilai rata-rata 3,960 dengan nilai konversi sebesar 99 dan termasuk pada kategori **"Bersih dari Korupsi"**. Hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyalahgunakan jabatan dengan tujuan tertentu.

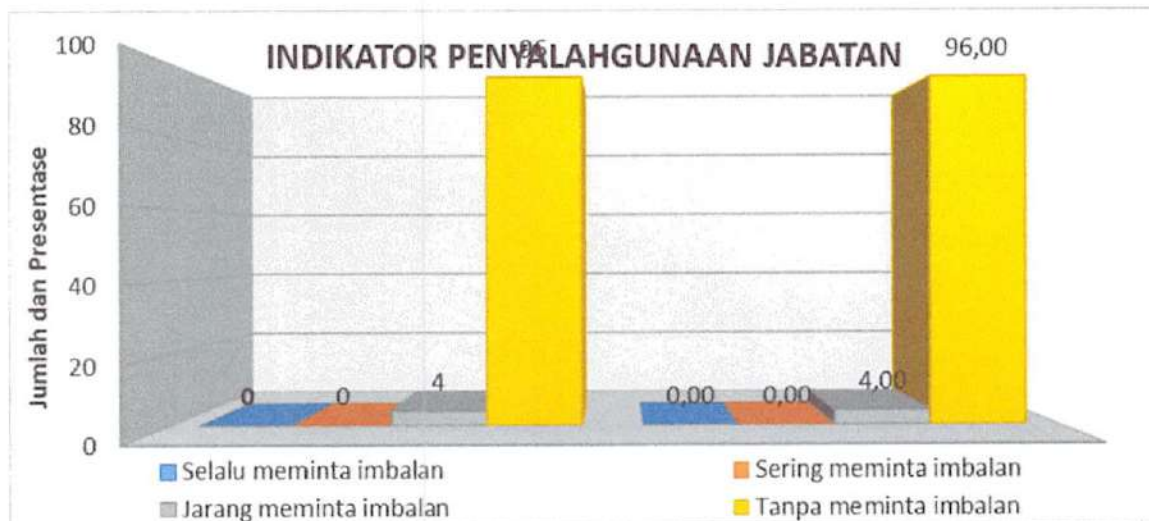
Tabel 8.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Penyalahgunaan Jabata

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu meminta imbalan	1	0	0,00
Sering meminta imbalan	2	0	0,00
Jarang meminta imbalan	3	4	4,00
Tanpa meminta imbalan	4	96	96,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 7.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan nilai rata - rata **3,960** dengan nilai konversi sebesar 99 dan termasuk pada kategori **"Bersih dari Korupsi"**. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari adanya upaya menjual pengaruh.

Tabel 9.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	4	4,00
Tidak Ada	4	96	96,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 8.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



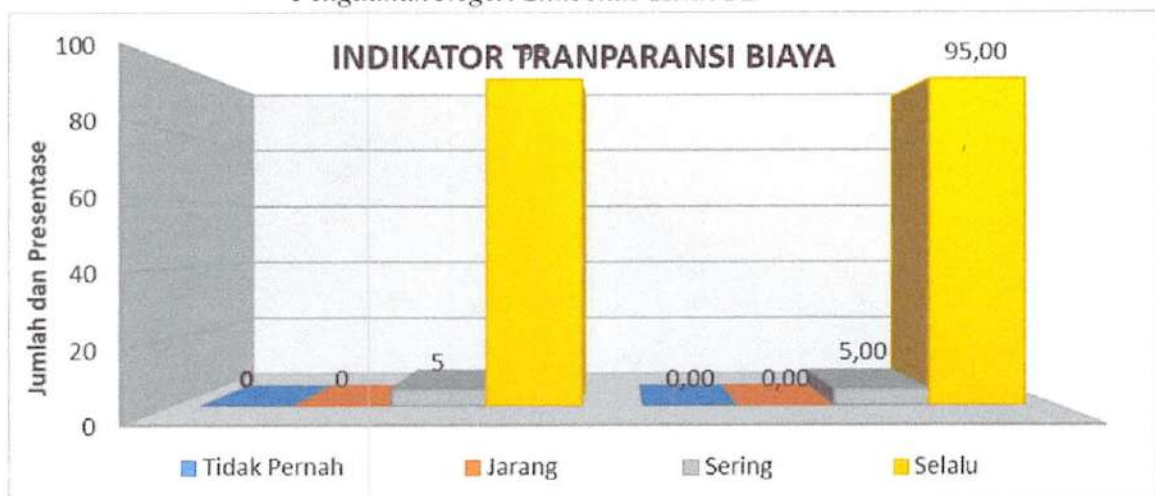
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya dalam hal keterbukaan informasi tentang Biaya/Tarif layanan ini menunjukkan nilai rata - rata **3.950** dengan nilai konversi sebesar 98,75 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan atau pencari keadilan sudah relatif mudah dalam memperoleh informasi mengenai tarif layanan pada Pengadilan Negeri Situbondo, baik melalui situs web resmi maupun melalui petugas layanan.

Tabel 10.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Transaksi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Pernah	1	0	0,00
Jarang	2	0	0,00
Sering	3	5	5,00
Selalu	4	95	95,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 9.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan nilai rata - rata **3,980** dengan nilai konversi sebesar 99,5 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa pengguna layanan atau pencari keadilan tidak dikenakan biaya tambahan untuk memperoleh layanan pada Pengadilan Negeri Situbondo. Artinya, pengenaan biaya kepada pengguna layanan atau pencari keadilan selalu sesuai tarif resmi berdasarkan peraturan yang berlaku.

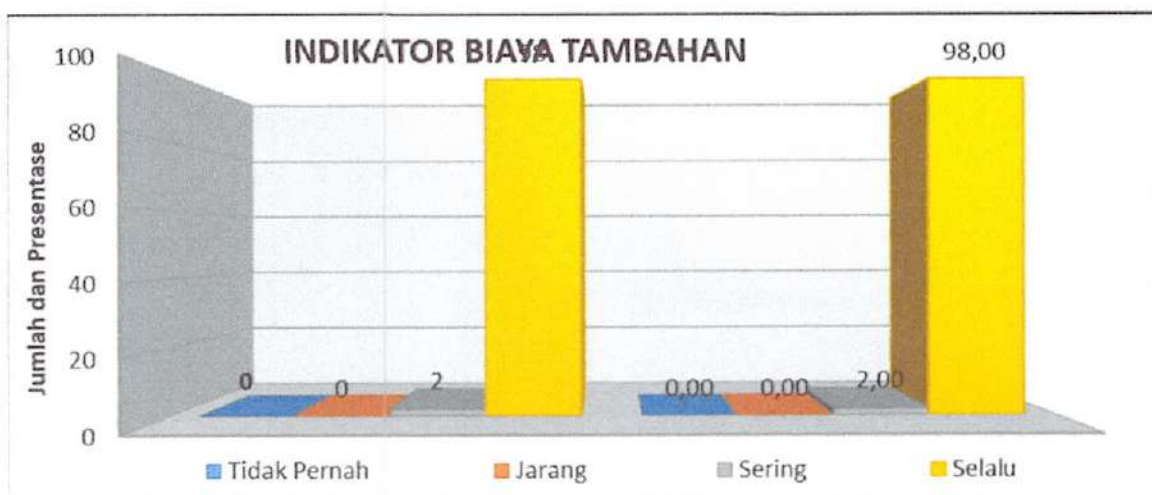
Tabel 11.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Biaya Tambahan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Pernah	1	0	0,00
Jarang	2	0	0,00
Sering	3	2	2,00
Selalu	4	98	98,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 10.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



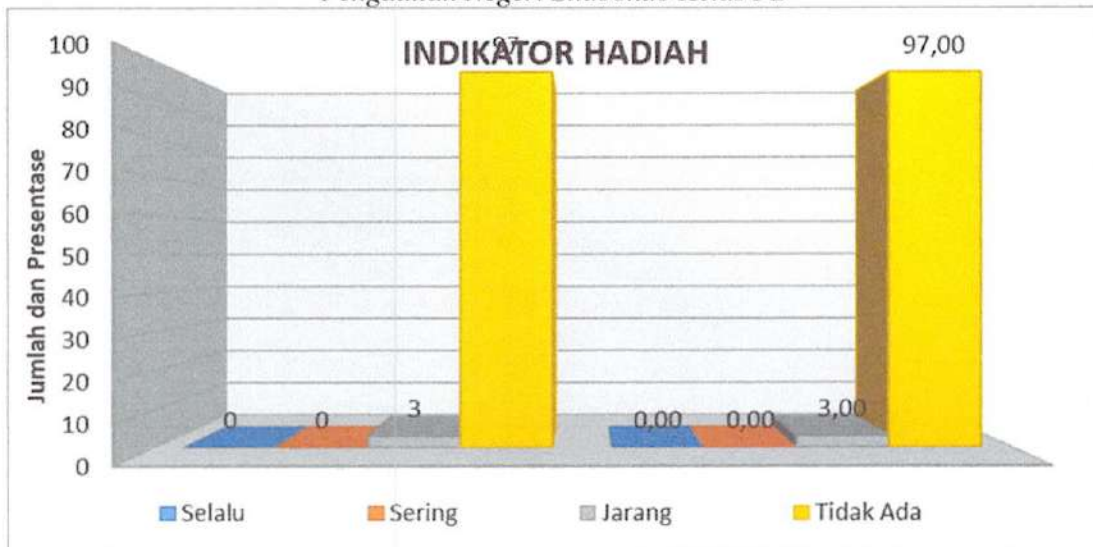
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan nilai rata-rata 3,970 dengan nilai konversi sebesar 99,25 dan termasuk pada kategori “**Bersih dari Korupsi**”. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari gratifikasi dan pemberian hadiah dalam bentuk apapun.

Tabel 12.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB pada Indikator Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	3	3,00
Tidak Ada	4	97	97,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 11.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rata-rata **3,98** dengan nilai konversi sebesar 99,5 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan biaya pelayanan telah dilakukan secara transparan oleh petugas layanan pada Pengadilan Negeri Situbondo sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 13.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Tranparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Pernah	1	0	0,00
Jarang	2	0	0,00
Sering	3	2	2,00
Selalu	4	98	98,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 12.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan nilai rata-rata 3.980 dengan nilai konversi sebesar 99.5 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari praktik percaloan.

Tabel 14.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Percaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	2	2,00
Tidak Ada	4	98	98,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 13.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan nilai rata - rata 3.99 dengan nilai konversi sebesar 99.75 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Percaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	1	1,00
Tidak Ada	4	99	99,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 14.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan nilai rata-rata **3,980** dengan nilai konversi sebesar 99,5 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Dapat disimpulkan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari praktik transaksi rahasia seperti pengurusan perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staf pengadilan di luar persidangan.

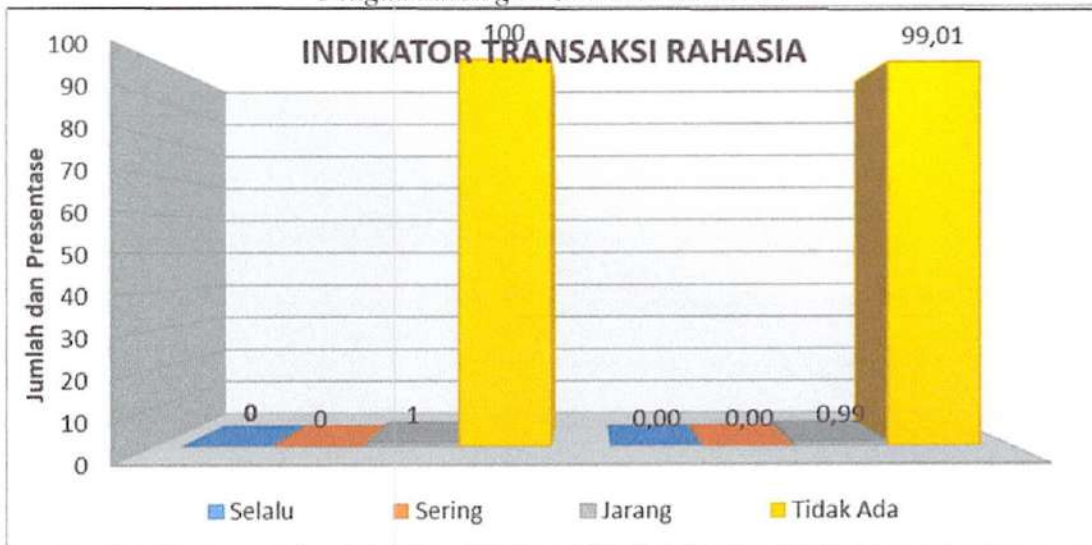
Tabel 16.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB pada Indikator Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	2	2,00
Tidak Ada	4	98	98,00
Jumlah Data		100	100,00

Gambar 15.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebesar **3,97** dengan nilai interval konversi Indeks Persepsi anti korupsi berada pada angka **99,23 %** termasuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

No.	Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,940	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,960	Bersih dari Korupsi	8
3	Menjual Pengaruh	3,960	Bersih dari Korupsi	7
4	Transaksi Biaya	3,950	Bersih dari Korupsi	9
5	Biaya Tambahan	3,980	Bersih dari Korupsi	5
6	Hadiah	3,970	Bersih dari Korupsi	6
7	Transparansi Biaya	3,980	Bersih dari Korupsi	4
8	Percaloan	3,980	Bersih dari Korupsi	2
9	Perbuatan Curang	3,990	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	3,980	Bersih dari Korupsi	3

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja **Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB**.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Persepsi Anti korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B diperoleh sebagai berikut :

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO Jl. PB. Sudirman No. 97 Situbondo	
NILAI	REPONDEN
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3,97</p> <p>(IPK)</p> <p>(BERSIH DARI KORUPSI)</p>	<p>Jumlah : 100 Orang</p> <p>Jenis Kelamin : L = 75 Orang /P = 25 Orang</p> <p>Pendidikan :</p> <p>SD = 0 orang</p> <p>SMP/SLTP = 0 orang</p> <p>SMA/SLTA = 34 orang</p>
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">99,23 %</p> <p>(PERSENTASE)</p> <p>(BERSIH DARI KORUPSI)</p>	<p>Diploma 1 = 0 orang</p> <p>Diploma 2 = 1 orang</p> <p>Diploma 3 = 0 orang</p> <p>Strata 1 = 61 orang</p> <p>Strata 2 = 3 orang</p> <p>Strata 3 = 1 orang</p>

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,940	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,960	Bersih dari Korupsi	8
3	Menjual Pengaruh	3,960	Bersih dari Korupsi	7
4	Transaksi Biaya	3,950	Bersih dari Korupsi	9
5	Biaya Tambahan	3,980	Bersih dari Korupsi	5
6	Hadiah	3,970	Bersih dari Korupsi	6
7	Transparansi Biaya	3,980	Bersih dari Korupsi	4
8	Percaloan	3,980	Bersih dari Korupsi	2
9	Perbuatan Curang	3,990	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	3,980	Bersih dari Korupsi	3

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa manipulasi biaya, menjual pengaruh, dan biaya tambahan paling rendah diantara indikator lainnya.

Oleh sebab itu dihimbau kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Situbondo, hendaknya meningkatkan kualitas/mutu pelayanan secara menyeluruh, khususnya pada 3 indikator terendah di atas.

LAMPIRAN

✓ Data Responden
Nama serta data responden

✓ Layanan
Layanan

3 Form Kuesioner
Bahan Baku Kuesioner 3

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 Tidak Sesuai Prosedur
 Jarang Sesuai Prosedur
 Sering Sesuai Prosedur
 Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?
 Petugas melayani selalu meminta imbalan
 Petugas melayani sering meminta imbalan
 Petugas melayani jarang meminta imbalan
 Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada